BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan

Selama menjalani kerja profesi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya di bagian Kepaniteraan Perdata, saya mendapat kesempatan untuk benar-benar terjun langsung ke dalam proses administrasi perkara yang sebelumnya hanya saya kenal sebatas teori. Selama lebih dari lima bulan, mulai dari 10 Maret hingga 29 Agustus 2025, saya mengikuti berbagai alur kerja, mulai dari input data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), proses verifikasi, pembaruan register, hingga pengarsipan berkas fisik. Lewat pengalaman ini, saya jadi benar-benar mengerti bahwa ketelitian dalam pengelolaan data bukan hanya soal administrasi biasa, tapi punya pengaruh langsung terhadap jalannya proses hukum.

Seiring waktu, saya tak hanya menjalankan tugas-tugas rutin, tapi juga mulai melihat gambaran yang lebih besar: bagaimana alur pengelolaan data perkara ini bisa berjalan lebih efisien? Saya memperhatikan bahwa meskipun SIPP sudah berbasis digital, masih banyak proses yang dikerjakan secara manual. Mulai dari pencatatan hingga pengarsipan, sebagian masih dilakukan di luar sistem. Ini membuat proses kadang lambat, apalagi ketika volume perkara tinggi dan data yang dikelola begitu banyak. Dari sini saya sadar, sistem yang sudah baik tetap perlu dievaluasi dan dikembangkan agar lebih terintegrasi dan adaptif.

Tantangan yang saya hadapi pun tidak sedikit. Mulai dari keterbatasan waktu praktik, beban data yang menumpuk, hingga sistem yang belum sepenuhnya mendukung integrasi informasi. Tak jarang saya harus menghadapi dokumen yang tidak lengkap, atau alur kerja yang tersendat karena perbedaan prosedur antara manual dan digital. Namun dari situ saya belajar bahwa teknologi saja tidak cukup. Proses bisnis juga harus tertata dengan jelas, dan kerja sama antarbagian perlu dibangun agar semua berjalan selaras.

Pengalaman ini membuat saya semakin yakin bahwa optimalisasi sistem informasi di sektor publik itu sangat penting, terutama di tempat seperti pengadilan yang setiap harinya berurusan dengan data penting dan proses hukum yang harus berjalan cepat dan akurat. Teknologi memang bisa mempercepat pekerjaan, tapi tanpa manajemen data yang rapi dan koordinasi tim yang baik, hasilnya tetap bisa jauh dari ideal. Saya belajar bahwa sistem yang baik bukan hanya tentang aplikasinya, tapi juga tentang bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja bersama di dalam satu alur proses yang jelas.

Secara keseluruhan, kerja praktik ini memberi saya banyak pelajaran yang tidak saya dapatkan di ruang kelas. Saya belajar bahwa sebagai mahasiswa Sistem Informasi, saya punya ruang kontribusi yang besar bahkan di lembaga seperti pengadilan. Berdasarkan pengalaman ini, saya menyarankan agar ke depannya pengelolaan data perkara dapat didukung dengan pelatihan yang lebih mendalam bagi staf, serta peningkatan sistem agar lebih terintegrasi dan otomatis. Dengan begitu, proses administrasi bisa menjadi lebih cepat, minim kesalahan, dan semakin mampu memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan publik.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman langsung selama menjalani kerja profesi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya di bagian Kepaniteraan Perdata, saya melihat dengan jelas bagaimana proses bisnis pengelolaan data perkara berjalan sehari-hari. Selama praktik, saya ikut terlibat mulai dari proses pencatatan perkara, verifikasi data, pembaruan register, sampai pengarsipan dokumen. Dari situ, saya belajar bahwa alur kerja administrasi perkara sangat bergantung pada ketepatan informasi dan koordinasi yang rapi antarbagian.

Namun, meskipun sistem SIPP sudah diterapkan sebagai alat utama dalam mendukung pekerjaan tersebut, saya melihat bahwa proses bisnis yang berjalan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Masih ada tahapan-tahapan yang dilakukan secara manual, seperti mengecek data fisik satu per satu, menyusun laporan secara terpisah, atau bahkan menyampaikan informasi lewat komunikasi lisan. Hal-hal seperti ini sering

kali membuat alur kerja terasa terputus, dan kadang menimbulkan kesalahan kecil yang bisa berdampak besar.

Melalui keterlibatan saya dalam berbagai proses itu, saya mulai menyadari bahwa sistem seperti SIPP sebenarnya punya potensi lebih besar jika digunakan secara maksimal. Bukan hanya sebagai alat input data, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengelolaan proses bisnis perkara mulai dari pertama hingga akhir. Oleh karena itu, saran-saran yang saya susun dalam bagian ini bukan hanya hasil dari pengamatan, tapi juga refleksi dari pengalaman langsung menghadapi tantangan di lapangan.

Saya berharap masukan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung perbaikan proses kerja ke depan, agar pengelolaan data perkara tidak hanya efisien, tapi juga lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik di bidang peradilan.

a. Penguatan peran SIPP sebagai pusat pengelolaan proses bisnis perkara

   Sebagai sistem inti dalam pencatatan perkara, SIPP sudah cukup membantu dalam mendukung alur administrasi. Namun, proses bisnis pengelolaan data perkara masih belum sepenuhnya terpusat secara digital. Banyak tahapan seperti input data dan pembaruan register masih dilakukan secara semi-manual. Disarankan agar SIPP dioptimalkan tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai penggerak utama proses bisnis perkara dengan memperkuat fungsi pemantauan perkara secara *real-time* dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.

b. Evaluasi berkala terhadap efektivitas proses bisnis pengelolaan data

   Dibutuhkan mekanisme evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencermati efektivitas setiap tahapan dalam alur bisnis pengelolaan data perkara. Evaluasi ini mencakup akurasi input, kelengkapan data dalam SIPP, serta kesesuaian antara data digital dan fisik. Melalui evaluasi

tersebut, instansi dapat mengidentifikasi hambatan dalam alur kerja, serta memperbaiki prosedur dan tanggung jawab tiap peran yang terlibat.

c. Integrasi visualisasi data ke dalam siklus proses bisnis

   Pengelolaan data perkara akan semakin bermanfaat jika dilengkapi dengan visualisasi data yang dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami tren, pola, dan volume beban kerja perkara. Visualisasi seperti grafik perkara masuk per bulan, status penyelesaian, atau klasifikasi jenis perkara dapat menjadi bagian dari proses pelaporan internal dan evaluasi rutin, sekaligus memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data.

d. Pembekalan peserta kerja profesi dengan konteks proses bisnis perkara

   Peserta kerja profesi di masa mendatang sebaiknya dibekali dengan pemahaman awal mengenai alur proses bisnis pengelolaan perkara dan cara kerja sistem informasi seperti SIPP. Pemahaman ini akan mempercepat adaptasi dan memungkinkan kontribusi yang lebih bermakna. Keterampilan dasar dalam pengolahan dan analisis data, seperti menggunakan Excel atau alat visualisasi lainnya, juga dapat menunjang efektivitas kerja selama praktik berlangsung.

e. Pengembangan fitur proses bisnis lanjutan pada SIPP

   Untuk mendukung proses bisnis yang lebih terintegrasi, disarankan agar SIPP dikembangkan dengan fitur-fitur lanjutan seperti pelaporan otomatis, dashboard *real-time*, notifikasi tahapan proses, dan analitik perkara. Fitur ini akan membantu mempercepat siklus kerja, memudahkan pelacakan tahapan, serta mendorong transparansi dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.

Dengan diterapkannya saran-saran ini, saya berharap proses bisnis pengelolaan data perkara di lingkungan Kepaniteraan Perdata dapat berjalan lebih efisien, tertata, dan saling terhubung secara digital dari awal hingga akhir. Sistem informasi seperti SIPP seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu kerja, tetapi menjadi pondasi utama dalam membangun proses peradilan yang lebih respon cepat, terbuka, dan berbasis pada data yang akurat. Ketika alur kerja dan teknologi bisa berjalan beriringan, pelayanan publik di pengadilan pun bisa menjadi lebih baik, tidak hanya untuk instansi internal, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan secara transparan dan terpercaya.

.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA